| **Draft Peraturan** | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** |
| RANCANGAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR ... TAHUN …  TENTANG  PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN DANA PENSIUN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
| Menimbang: |  |  |  |
| 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (4), Pasal 139 ayat (7), Pasal 140 ayat (4), Pasal 142 ayat (7), Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (8), Pasal 183 ayat (7), Pasal 184 ayat (9), dan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun; |  |  |  |
| 1. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun dipandang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan perkembangan industri dana pensiun di Indonesia sehingga diperlukan penyempurnaan ketentuan; |  |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun; |  |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN DANA PENSIUN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |
| Pasal 1 | Cukup jelas. |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang selanjutnya disingkat DPPK, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang selanjutnya disingkat DPLK, Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti program pensiun. |  |  |  |
| 1. Usia Pensiun Normal adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan manfaat pensiun. |  |  |  |
| 1. Pendiri adalah badan hukum yang membentuk DPPK dan/atau DPLK. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada pengurus. |  |  |  |
| 1. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ perusahaan/badan hukum yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
| 1. Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi. |  |  |  |
| 1. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. |  |  |  |
| 1. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun adalah adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. |  |  |  |
| 1. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi peserta. |  |  |  |
| 1. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. |  |  |  |
| 1. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun. |  |  |  |
| 1. Program Manfaat Lain adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun, termasuk yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. Program Manfaat Lain Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PMLMP adalah Program Manfaat Lain yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Manfaat Lain yang bukan merupakan program manfaat lain iuran pasti. |  |  |  |
| 1. Program Manfaat Lain Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PMLIP adalah Program Manfaat Lain yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat lain. |  |  |  |
| 1. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Pihak adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan afiliasi |  |  |  |
| 1. Mitra Pendiri adalah pemberi kerja yang menyertakan sebagian atau seluruh karyawannya ke dalam Program Pensiun yang diselenggarakan oleh DPPK. |  |  |  |
| 1. Pemberi Kerja adalah Setiap Orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. |  |  |  |
| 1. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam PDP suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta. |  |  |  |
| 1. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, yang ditunda pembayarannya paling cepat sampai pada saat Peserta memasuki usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal. |  |  |  |
| 1. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki janda/duda atau anak. |  |  |  |
| 1. Iuran Sukarela Peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta Dana Pensiun untuk meningkatkan Manfaat Pensiun. |  |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuaria yang disusun oleh Aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain. |  |  |  |
| 1. Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. |  |  |  |
| 1. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu Janda/Duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki Janda/Duda atau anak. |  |  |  |
| 1. Tim Likuidasi adalah Pihak yang melakukan proses likuidasi Dana Pensiun; |  |  |  |
| 1. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |  |  |
| Jenis Dana Pensiun terdiri atas: |  |  |  |
| 1. DPPK; dan |  |  |  |
| 1. DPLK. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| PEMBENTUKAN DANA PENSIUN, PDP, DAN PERUBAHAN PDP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Pihak yang Membentuk Dana Pensiun |  |  |  |
| Pasal 3 |  |  |  |
| Setiap Orang yang menjalankan Program Pensiun wajib memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali Program Pensiun yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. | Program Pensiun yang didasarkan pada undang-undang tersendiri di antaranya mencakup Program Pensiun pada sistem jaminan sosial nasional dan Program Pensiun bagi penyelenggara negara. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 4 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. DPPK hanya dapat dibentuk oleh Pemberi Kerja dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai: |  |  |  |
| * + - * 1. bank umum; |  |  |  |
| * + - * 1. bank umum syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. perusahaan asuransi jiwa; |  |  |  |
| * + - * 1. perusahaan asuransi jiwa syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. manajer investasi; atau |  |  |  |
| * + - * 1. manajer investasi syariah, |  |  |  |
| dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 5 |  |  |  |
| DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP. | Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP” adalah DPPK dapat menyelenggarakan:   1. PPMP; 2. PPIP; atau 3. PPMP dan PPIP. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Persyaratan Pembentukan Dana Pensiun |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 6 |  |  |  |
| 1. DPPK dapat didirikan untuk lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja. | Dalam hal Dana Pensiun dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja, 1 (satu) Pemberi Kerja bertindak sebagai Pendiri dan Pemberi Kerja lainnya bertindak sebagai Mitra Pendiri. DPPK yang dibentuk oleh lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja didasarkan pada pertimbangan praktis, efisiensi, atau alasan lainnya. |  |  |
| 1. Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang terdiri atas: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. mengetahui pengaturan di bidang Dana Pensiun serta ketenagakerjaan; |  |  |  |
| * + - * 1. berkomitmen untuk menjalankan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. telah memiliki kajian atau rencana bisnis terkait pendirian DPPK; dan |  |  |  |
| * + - * 1. telah memiliki peraturan perusahaan yang menyatakan akan mengikutkan karyawannya ke Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 7 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP. |  |  |  |
| 1. Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dan manajer investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, wajib memenuhi persyaratan yang terdiri atas: |  |  |  |
| * + - * 1. memiliki penilaian tingkat kesehatan minimal peringkat 2 (dua) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan; |  |  |  |
| * + - * 1. tidak sedang mengalami kesulitan keuangan; |  |  |  |
| * + - * 1. memiliki reputasi yang baik; |  |  |  |
| * + - * 1. dalam pengawasan normal; dan |  |  |  |
| * + - * 1. mencantumkan rencana pembentukan DPLK dalam rencana bisnis tahun berjalan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan |  |  |  |
| 1. Bagi manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan manajer investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan tambahan terdiri atas: |  |  |  |
| * + - * 1. memiliki dana kelolaan minimal sebesar Rp.25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah) pada saat mendirikan DPLK; |  |  |  |
| * + - * 1. tidak mengalami defisit atau rugi dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan |  |  |  |
| * + - * 1. wajib selalu memenuhi nilai modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Pembentuan DPPK |  |  |  |
| Pasal 8 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan DPPK kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pembentukan DPPK wajib menggunakan formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran pada romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: |  |  |  |
| * + - * 1. PDP sebanyak 2 (dua) rangkap; |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan tertulis Pendiri; |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada; |  |  |  |
| * + - * 1. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri; |  |  |  |
| * + - * 1. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada; |  |  |  |
| * + - * 1. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan tertulis calon Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. Arahan Investasi; |  |  |  |
| * + - * 1. Laporan Aktuaris, apabila menyelenggarakan PPMP; |  |  |  |
| * + - * 1. surat penunjukan Bank Kustodian; |  |  |  |
| * + - * 1. surat perjanjian Pengurus dengan Bank Kustodian; |  |  |  |
| * + - * 1. neraca awal DPPK dalam hal terdapat kekayaan atau dana awal, jika ada; |  |  |  |
| * + - * 1. kesiapan sistem DPPK; |  |  |  |
| * + - * 1. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha; dan |  |  |  |
| * + - * 1. ringkasan PDP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 9 |  |  |  |
| Pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan pernyataan tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c harus disetujui oleh pemilik Pendiri, atau rapat umum pemegang saham, atau yang setara dengan itu, serta memuat: | Yang dimaksud dengan pihak yang setara dengan pemilik Pendiri, atau rapat umum pemegang saham antara lain adalah   1. rapat umum pemegang saham, untuk badan hukum perseroan terbatas/keputusan yang mengikat di luar rapat umum pemegang saham (*circular resolution*); 2. rapat anggota tahunan, untuk koperasi; 3. pemilik, untuk perusahaan perseorangan; 4. rapat pembina, untuk yayasan.   Perlunya persetujuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pemilik atau pemegang saham dari masing-masing Pemberi Kerja (Pendiri maupun Mitra Pendiri) mengetahui konsekuensi pendanaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Program Pensiun. |  |  |
| 1. ringkasan PDP; dan |  |  |  |
| 1. kesediaan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta PDP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 10 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| * + - * 1. analisis atas kelengkapan dokumen; |  |  |  |
| * + - * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan |  |  |  |
| * + - * 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor DPPK untuk memastikan kesiapan operasional Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan pembentukan DPPK. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian pengesahan pembentukan kepada DPPK. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PDP satu diantaranya dikembalikan kepada Pendiri dan yang lainnya disimpan di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perbedaan di antara kedua PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka yang dianggap benar adalah PDP yang disimpan di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 11 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. DPPK memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu DPPK sejak tanggal pengesahan pembentukan DPPK oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pengurus wajib mengumumkan pembentukan DPPK dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Pembentukan DPLK |  |  |  |
| Pasal 12 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan DPLK kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pembentukan DPLK wajib menggunakan formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran pada romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: |  |  |  |
| * + - * 1. PDP sebanyak 2 (dua) rangkap; |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan tertulis Pendiri; |  |  |  |
| * + - * 1. fotokopi anggaran dasar Pendiri; |  |  |  |
| * + - * 1. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan tertulis calon Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. bukti kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK; |  |  |  |
| * + - * 1. program kerja DPLK; |  |  |  |
| * + - * 1. manual sistem administrasi dan pengolahan DPLK; |  |  |  |
| * + - * 1. formulir-formulir atau dokumen yang akan digunakan dalam rangka kepesertaan DPLK; |  |  |  |
| * + - * 1. struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas yang terkait dengan Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah; |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan tertulis calon Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. |  |  |  |
| * + - * 1. rekomendasi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan; dan |  |  |  |
| * + - * 1. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 13 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| * + - * 1. analisis atas kelengkapan dokumen; |  |  |  |
| * + - * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan |  |  |  |
| * + - * 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor DPLK untuk memastikan kesiapan operasional DPLK. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan pembentukan DPLK. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian pengesahan pembentukan kepada DPLK. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PDP satu diantaranya dikembalikan kepada Pendiri dan yang lainnya disimpan di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perbedaan di antara kedua PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka yang dianggap benar adalah PDP yang disimpan di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 14 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. DPLK memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu DPLK sejak tanggal pengesahan pembentukan DPLK oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pengurus wajib mengumumkan pembentukan DPLK dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Pembentukan Dana Pensiun Yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 1 |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
| Pasal 15 | Cukup jelas. |  |  |
| Dana Pensiun dapat menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah dalam bentuk: |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. unit syariah di DPPK yang menyelenggarakan PPIP; atau |  |  |  |
| 1. penjualan paket investasi syariah di DPLK. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2 |  |  |  |
| Pembentukan Dana Pensiun Syariah Melalui Konversi |  |  |  |
| Pasal 16 |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun dapat dikonversi menjadi Dana Pensiun Syariah dalam hal Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti persyaratan perubahan PDP dan ditambah hal-hal sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. maksud dan tujuan Dana Pensiun untuk menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. akad yang digunakan; |  |  |  |
| * + - * 1. tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali Dewan Pengawas Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. masa jabatan Dewan Pengawas Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. ketentuan mengenai dana *ta’zir*, bagi DPPK; |  |  |  |
| * + - * 1. besar iuran untuk Program Pensiun; dan |  |  |  |
| * + - * 1. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan manfaat lain; |  |  |  |
| 1. Permohonan konversi Dana Pensiun Syariah selain mengajukan perubahan PDP harus juga menyampaikan dokumen tambahan sebagai berikut: |  |  |  |
| * + - * 1. rencana penyesuaian aset Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah sehingga sesuai dengan Prinsip Syariah; | Dana Pensiun yang bermaksud melakukan konversi menjadi Dana Pensiun Syariah mungkin saja memiliki investasi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah seperti investasi pada obligasi. Pada saat Dana Pensiun akan melakukan konversi, jenis investasi Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah harus disesuaikan terlebih dahulu sehingga seluruh investasi Dana Pensiun pada saat menjadi Dana Pensiun Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |
| * + - * 1. bukti pemberitahuan perihal rencana konversi kepada peserta Dana Pensiun; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. Arahan Investasi, bagi DPPK. | Yang dimaksud dengan “Arahan Investasi” adalah arahan investasi yang telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga instrumen investasi yang diperkenankan sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 17 | Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat mengajukan konversi menjadi Dana Pensiun Syariah, Pendiri harus juga menyampaikan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 3  Pembentukan Unit Syariah Bagi DPPK yang Menyelenggarakan PPIP |  |  |  |
| Pasal 18 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang membentuk Unit Syariah harus memenuhi syarat sebagai berikut: |  |  |  |
| * + - * 1. memiliki Pengurus DPPK yang ditunjuk sebagai pengelola Unit Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. memiliki calon Peserta Unit Syariah; dan |  |  |  |
| * + - * 1. memisahkan aset dan liabilitas Unit Syariah dari aset dan liabilitas DPPK non-Unit Syariah yang menyelenggarakan PPIP. |  |  |  |
| 1. Dalam hal calon Peserta Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang telah ada sebelum pembentukan Unit Syariah, DPPK yang menyelenggarakan PPIP wajib: |  |  |  |
| * + - * 1. menyampaikan informasi kepada Peserta yang bersangkutan bahwa kepesertaannya akan dialihkan ke Unit Syariah; dan |  |  |  |
| * + - * 1. meminta pernyataan kesediaan dari setiap Peserta yang akan beralih menjadi peserta Unit Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 19 |  |  |  |
| 1. Pembentukan Unit Syariah dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan pengesahan perubahan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti persyaratan perubahan PDP dan ditambah hal-hal sebagai berikut: |  |  |  |
| * + - * 1. maksud dan tujuan DPPK yang menyelenggarakan PPIP untuk membentuk Unit Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. akad yang digunakan; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali Dewan Pengawas Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. masa jabatan Dewan Pengawas Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. ketentuan mengenai dana *ta’zir*; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. aset dan liabilitas Unit Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. besar iuran untuk Program Pensiun; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan manfaat lain. | Isi PDP antara lain memuat pengaturan mengenai cara penentuan aset dan liabilitas yang dipisahkan atau dialihkan ke Unit Syariah pada saat pertama kali Unit Syariah dibentuk dan penegasan keterpisahan aset dan liabilitas Unit Syariah dari aset dan liabilitas Dana Pensiun lainnya. |  |  |
| 1. Permohonan pembentukan selain mengajukan perubahan PDP wajib juga menyampaikan dokumen tambahan sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. Arahan Investasi; |  |  |  |
| * + - * 1. bukti pemberitahuan informasi kepada Peserta; |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan Pendiri tentang jumlah calon Peserta Unit Syariah dan aset Unit Syariah; dan |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang memilih menjadi Peserta Unit Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 20 | Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat mengajukan pembentukan Unit Syariah, Pendiri harus juga menyampaikan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 21 |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat Peserta yang memilih menjadi Peserta Unit Syariah, DPPK yang menyelenggarakan PPIP wajib melakukan pemisahan aset dan liabilitas Peserta yang memilih Unit Syariah paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengesahan perubahan PDP. | Yang dimaksud dengan “pemisahan aset” adalah memisahkan aset peserta yang pindah ke Unit Syariah. |  |  |
| 1. Pemisahan aset dan liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dan diatur dalam PDP. | Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah sesuai dengan porsi Peserta yang beralih ke Unit Syariah. Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, porsi aset dan liabilitas Peserta Unit Syariah dihitung oleh aktuaris. Adapun bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP, porsi aset dan liabilitas Peserta Unit Syariah didasarkan pada saldo rekening Peserta. |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 4 |  |  |  |
| Penjualan Paket Investasi Syariah di DPLK |  |  |  |
| Pasal 22 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pendiri DPLK yang akan menjual paket investasi syariah wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Permohonan pengesahan perubahan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti persyaratan perubahan PDP dan ditambah hal-hal sebagai berikut: |  |  |  |
| * + - * 1. pilihan jenis investasi syariah yang tersedia bagi Peserta; |  |  |  |
| * + - * 1. akad yang digunakan; |  |  |  |
| * + - * 1. tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali Dewan Pengawas Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. masa jabatan Dewan Pengawas Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. besar iuran untuk Program Pensiun; dan |  |  |  |
| * + - * 1. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan manfaat lain. |  |  |  |
| 1. Pada saat mengajukan pengajuan untuk menjual paket investasi syariah, Pendiri wajib juga menyampaikan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 5 |  |  |  |
| Persetujuan dan Penolakan Pembentukan Dana Pensiun Yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| Pasal 23 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengesahan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengesahan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| * + - * 1. analisis atas kelengkapan dokumen; |  |  |  |
| * + - * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan |  |  |  |
| * + - * 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah untuk memastikan kesiapan operasional. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian pengesahan pembentukan kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PDP satu diantaranya dikembalikan kepada Pendiri dan yang lainnya disimpan di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perbedaan di antara kedua PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka yang dianggap benar adalah PDP yang disimpan di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Isi Minimum PDP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 1 |  |  |  |
| Isi Minimum PDP DPPK |  |  |  |
| Pasal 24 |  |  |  |
| 1. PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memuat: |  |  |  |
| * + - * 1. nama DPPK; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. nama Pendiri; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. nama Mitra Pendiri, jika ada; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. tanggal pembentukan DPPK; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. maksud dan tujuan pembentukan DPPK; | Pencantuman maksud dan tujuan pembentukan DPPK agar diketahui secara jelas bahwa DPPK menyelenggarakan PPMP atau PPIP. |  |  |
| * + - * 1. jumlah Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. masa jabatan Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Peserta dan Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. persyaratan untuk menjadi Peserta; | Persyaratan untuk menjadi Peserta antara lain usia, status kekaryawanan, masa kerja dan persyaratan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Pemberi Kerja. |  |  |
| * + - * 1. karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. Usia Pensiun Normal; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. akad yang digunakan bagi DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. pengaturan masa kerja Peserta; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. besar iuran untuk Program Pensiun; | Dalam PPIP, iuran Peserta bila ada dan iuran Pemberi Kerja ditetapkan dalam PDP. Dalam PPMP, iuran Peserta bila ada ditetapkan dalam PDP sedangkan iuran Pemberi Kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaris. |  |  |
| * + - * 1. rumus Manfat Pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya, termasuk Penghasilan Dasar Pensiun, penetapan minimal Manfaat Pensiun, penetapan kenaikan Manfaat Pensiun (jika ada); | Pada PPMP rumus Manfaat Pensiun antara lain berupa:   1. perkalian antara persentase penghargaan per tahun masa kerja, masa kerja, dan Dasar Pensiun; atau 2. perkalian antara sejumlah rupiah yang tetap besarnya untuk setiap tahun masa kerja, dan masa kerja.   Pada PPIP, Manfaat Pensiun bagi Peserta pada dasarnya adalah akumulasi seluruh iuran dan hasil pengembangannya. Untuk mengetahui besarnya Manfaat Pensiun dalam bentuk pembayaran pensiun berkala (bulanan), maka seluruh iuran dan hasil pengembangan dimaksud harus dipergunakan untuk membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa. |  |  |
| * + - * 1. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan manfaat lain; | Termasuk di dalam tata cara pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan manfaat lainnya antara lain adalah ketentuan mengenai dokumen yang harus dilengkapi oleh penerima manfaat, tempat dan saat pembayaran manfaat. |  |  |
| * + - * 1. ketentuan mengenai dana ta’zir bagi DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia; dan | Di dalam PDP perlu ditetapkan tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.  Penunjukan ini perlu dilakukan agar terdapat kejelasan mengenai Pihak yang Berhak atas pembayaran yang seharusnya menjadi hak peserta, yang sekurang-kurangnya adalah himpunan iuran Peserta sendiri beserta hasil pengembangannya. |  |  |
| * + - * 1. biaya yang merupakan beban DPPK. | Pengeluaran dari Dana Pensiun terutama adalah untuk pembayaran Manfaat Pensiun. Agar pengeluaran-pengeluaran lain dari Dana Pensiun, yang merupakan bagian dari biaya penyelenggaraan Program Pensiun, tetap terkendali dan tidak mengurangi bagian yang diperuntukkan bagi pembiayaan Manfaat Pensiun, maka perlu ditetapkan biaya-biaya yang dapat dikeluarkan dari Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK menjalankan 2 (dua) jenis Program Pensiun, DPPK harus menyusun 2 (dua) PDP untuk masing-masing jenis Program Pensiun, kecuali ketentuan terkait huruf a sampai dengan huruf i. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2 |  |  |  |
| Isi Minimum PDP DPLK |  |  |  |
| Pasal 25 |  |  |  |
| PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memuat: |  |  |  |
| 1. nama DPLK; | Nama DPLK menjadi identitas yang digunakan untuk DPLK dimaksud dengan DPLK lain. Selain itu nama DPLK juga perlu dibedakan dari nama DPPK yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, dalam kedudukannya sebagai Pemberi Kerja untuk kepentingan para karyawannya. |  |  |
| 1. nama Pendiri; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. tanggal pembentukan DPLK; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. maksud dan tujuan pembentukan DPLK; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. jumlah Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas bagi DPLK yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. masa jabatan Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas bagi DPLK yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; | Hak Pengurus antara lain:   1. menerima imbalan jasa atas tugas kepengurusannya; 2. meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan. |  |  |
| 1. persyaratan untuk menjadi Peserta; | Untuk kepentingan usahanya, Pendiri dapat menetapkan persyaratan untuk menjadi Peserta. |  |  |
| 1. Usia Pensiun Normal; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. hak Peserta untuk menentukan usia pensiun namun tidak kurang dari Usia Pensiun Normal; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. akad yang digunakan bagi DPLK yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. hak Peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia; | Manfaat Pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan ditentukan oleh hasil akhir dari iuran dan pengembangannya yang seluruhnya merupakan risiko bagi Peserta. Dengan demikian Pesertalah yang menentukan pilihan jenis investasi. |  |  |
| 1. pilihan jenis investasi yang tersedia bagi peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya; | Pendiri menyediakan jenis investasi yang dapat dipilih Peserta, beserta ketentuan-ketentuan untuk memilih jenis investasi tersebut atau untuk mengubah pilihan dari satu jenis ke jenis lain. |  |  |
| 1. tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap Peserta yang harus dilakukan oleh Pengurus; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. hak peserta untuk memilih bentuk anuitas atau anuitas syariah, dan memilih perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, beserta tata caranya; | Anuitas seumur hidup pada dasarnya merupakan sumber penghasilan bagi pensiunan maka pemilihannya diberikan kepada Peserta. |  |  |
| 1. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan manfaat lain; | Tata cara dimaksud dalam huruf ini antara lain berkaitan dengan berbagai kemungkinan pembayaran dari Dana Pensiun secara sekaligus, penarikan dana yang berasal dari iuran setiap saat dan jangka waktu pemberitahuan tentang maksud Peserta untuk mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain. |  |  |
| 1. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dan pengalihan kepesertaan ke DPLK lain; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. biaya yang dapat dipungut dari Peserta, atau dibebankan pada rekening Peserta. | Pembebanan biaya kepada Peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menarik langsung dari Peserta di luar iuran atau memotong langsung dari hasil investasi yang menjadi hak Peserta. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh |  |  |  |
| Perubahan PDP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 1 |  |  |  |
| Persyaratan Perubahan PDP |  |  |  |
| Pasal 26 |  |  |  |
| 1. Perubahan PDP dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengesahan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan dalam hal penangguhan dan pengakhiran penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan PDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberlakuannya harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri dan/atau Mitra Pendiri (jika ada). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal perubahan PDP dimaksud mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan/atau besarnya Manfaat Pensiun, pernyataan tertulis Pendiri dan/atau Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu. | Perubahan atas PDP yang mengakibatkan perubahan dalam pendanaan dan/atau besarnya Manfaat Pensiun antara lain adalah pengubahan persentase penghargaan per tahun masa kerja, menambah jumlah masa kerja yang diperhitungkan dalam penentuan besar Manfaat Pensiun, besarnya iuran Pemberi Kerja atau mempercepat usia kepesertaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 27 | Cukup jelas. |  |  |
| Untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pendiri mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran pada romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: |  |  |  |
| 1. PDP yang baru sebanyak 2 (dua) rangkap; |  |  |  |
| 1. pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3); |  |  |  |
| 1. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4); |  |  |  |
| 1. pernyataan tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), jika ada; |  |  |  |
| 1. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), jika ada; |  |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris, apabila perubahan PDP mengakibatkan perubahan dalam hal pendanaan dan Manfaat Pensiun, bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP; |  |  |  |
| 1. fotokopi anggaran dasar Pendiri yang memuat perubahan nama Pendiri bagi DPLK, apabila mengubah nama Pendiri; |  |  |  |
| 1. fotokopi izin usaha asuransi jiwa atau bank umum dari OJK bagi DPLK, apabila mengubah nama Pendiri; dan |  |  |  |
| 1. Persandingan pokok-pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah bagi DPLK. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 28 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengesahan perubahan PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengesahan perubahan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| * + - * 1. analisis atas kelengkapan dokumen; dan |  |  |  |
| * + - * 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan perubahan PDP. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan pengesahan perubahan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian pengesahan perubahan PDP kepada Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan perubahan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan. |  |  |  |
| 1. Perubahan PDP berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, satu diantaranya dikembalikan kepada Pendiri dan yang lainnya disimpan di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perbedaan di antara kedua PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka yang dianggap benar adalah PDP yang disimpan di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan perubahan PDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2 |  |  |  |
| Perubahan PDP Dalam Rangka Perubahan Program Pensiun |  |  |  |
| Pasal 29 |  |  |  |
| 1. Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan Program Pensiun, Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti persyaratan permohonan pengesahan perubahan PDP dan ditambah hal-hal sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. maksud dan tujuan perubahan Program Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. besar iuran untuk Program Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan manfaat lain; dan |  |  |  |
| * + - * 1. tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal perubahan Program Pensiun dilakukan dari PPMP menjadi PPIP, selain memenuhi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut: |  |  |  |
| * + - * 1. laporan keuangan *audited*; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. laporan aktuaris; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. dokumen tertulis berupa kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta antara lain melalui serikat pekerja yang diakui atau perwakilan Peserta berdasarkan mekanisme internal perusahaan. | Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta antara lain melalui serikat pekerja yang diakui atau perwakilan Peserta berdasarkan mekanisme internal perusahaan. |  |  |
| 1. Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib tertuang dalam bentuk akta notaris yang paling sedikit memuat: |  |  |  |
| * + - * 1. perubahan Program Pensiun dari PPMP menjadi PPIP; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. hak Peserta; dan | Yang dimaksud dengan “hak Peserta” adalah kewajiban Pemberi Kerja kepada Peserta. |  |  |
| * + - * 1. pengunaan Surplus, jika ada. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 3 |  |  |  |
| Perubahan PDP Dalam Rangka Penggabungan dan Pemisahan DPPK |  |  |  |
| Pasal 30 |  |  |  |
| 1. Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan penggabungan dan/atau pemisahan, Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti persyaratan permohonan pengesahan perubahan PDP dan ditambah hal-hal sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. maksud dan tujuan penggabungan dan/atau pemisahan; |  |  |  |
| * + - * 1. besar iuran untuk Program Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan manfaat lain; dan |  |  |  |
| * + - * 1. tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah. |  |  |  |
| 1. Permohonan pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP selain mengajukan perubahan PDP wajib juga menyampaikan dokumen tertulis berupa kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta yang paling sedikit memuat: | Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c. |  |  |
| * + - * 1. pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. hak Peserta; dan | Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (4) huruf b. |  |  |
| * + - * 1. pengunaan Surplus, jika ada. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimuat dalam bentuk akta notaris. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 31 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun konvensional, hasil penggabungan hanya dapat menjadi Dana Pensiun Syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Dana Pensiun Syariah dan mengakibatkan terbentuknya Dana Pensiun baru, bentuk pendirian hanya dapat menjadi Dana Pensiun Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 4 |  |  |  |
| Perubahan PDP Dalam Rangka Penyelenggaraan Iuran Sukarela Peserta |  |  |  |
| Pasal 32 | Cukup jelas. |  |  |
| Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta, wajib mengikuti persyaratan isi minimum PDP dan ditambah hal-hal sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. persyaratan Peserta yang dapat diikutsertakan dalam Iuran Sukarela Peserta; |  |  |  |
| 1. waktu pembayaran Iuran Sukarela Peserta; |  |  |  |
| 1. besaran minimum Iuran Sukarela Peserta; |  |  |  |
| 1. penempatan investasi atas Iuran Sukarela Peserta; |  |  |  |
| 1. biaya yang dikenakan atas pengelolaan Iuran Sukarela Peserta; |  |  |  |
| 1. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan |  |  |  |
| 1. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta beserta hasil pengembangannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 5 |  |  |  |
| Perubahan PDP Dalam Rangka Penyelenggaraan Manfaat Pensiun Lainnya dan/atau Manfaat Lain |  |  |  |
| Pasal 33 | Cukup jelas. |  |  |
| Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain, wajib mengikuti persyaratan isi minimum PDP dan ditambah hal-hal sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. persyaratan Peserta yang dapat diikutsertakan dalam Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain; |  |  |  |
| 1. jenis Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain; |  |  |  |
| 1. waktu pembayaran Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain; |  |  |  |
| 1. besaran minimum Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain; |  |  |  |
| 1. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain; dan |  |  |  |
| 1. biaya yang dikenakan atas pengelolaan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain; |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedelapan |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
| Pasal 34 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 28 ayat (11), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * + - * 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| * + - * 1. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau |  |  |  |
| * + - * 1. penurunan tingkat kesehatan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya |  |  |  |
| 1. Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesembilan |  |  |  |
| Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama |  |  |  |
| Pasal 35 | Cukup jelas. |  |  |
| Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |
| ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DANA PENSIUN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
| Pasal 36 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi keuangan dan investasi, dan fungsi pelayanan. |  |  |  |
| 1. Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Pengurus. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib memiliki susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik dan komite yang mempunyai fungsi khusus. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan fungsi selain fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Admnistratif | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 37 |  |  |  |
| 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * + - * 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| * + - * 1. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau |  |  |  |
| * + - * 1. penurunan tingkat kesehatan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya |  |  |  |
| 1. Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama |  |  |  |
| Pasal 38 | Cukup jelas. |  |  |
| Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |
| TATA KELOLA YANG BAIK BAGI DANA PENSIUN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun |  |  |  |
| Pasal 38 |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dan manajemen risiko yang efektif dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | Penerapan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dalam setiap kegiatan usaha Dana Pensiun termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib dikelola dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam PDP. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit diwujudkan dalam: |  |  |  |
| * + - * 1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah; | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut. |  |  |
| * + - * 1. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. penerapan kebijakan remunerasi; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. rencana bisnis Dana Pensiun; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Dana Pensiun; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. penerapan keuangan berkelanjutan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pengurus, direviu oleh Dewan Pengawas, dan ditetapkan oleh Pendiri. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 39 | Cukup jelas. |  |  |
| Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun bertujuan untuk: |  |  |  |
| 1. mengoptimalkan nilai Dana Pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; |  |  |  |
| 1. meningkatkan pengelolaan Dana Pensiun secara profesional, efektif, dan efisien; |  |  |  |
| 1. meningkatkan kepatuhan komite Dana Pensiun serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Dana Pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan; |  |  |  |
| 1. mewujudkan Dana Pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan |  |  |  |
| 1. meningkatkan kontribusi Dana Pensiun dalam perekonomian nasional. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 40 | Cukup jelas. |  |  |
| Pendiri, Pemberi Kerja, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengurus, dan pihak lain yang terkait dengan Dana Pensiun bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sesuai dengan fungsi dan tugasnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Pendiri dan Mitra Pendiri |  |  |  |
| Pasal 41 |  |  |  |
| 1. Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun. | Dana Pensiun terselenggara karena Pendiri menetapkan PDP yang selanjutnya disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun sampai Dana Pensiun dibubarkan. |  |  |
| 1. Pengurus dan Dewan Pengawas ditunjuk oleh dan bertanggung jawab penuh kepada Pendiri. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, pendiri DPLK harus menunjuk Pengurus. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penunjukan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penggantinya harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya penunjukan atau penggantian dimaksud. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pendiri dapat memberhentikan dan mengubah susunan Pengurus dan Dewan Pengawas. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pendiri dan Mitra Pendiri wajib mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada Dana Pensiun. | Salah satu contoh bentuk dukungan Pendiri DPPK atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun adalah dalam melakukan evaluasi atas kinerja Pengurus DPPK dan Dewan Pengawas, salah satu aspek yang dinilai adalah penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.  Salah satu contoh bentuk dukungan Pendiri DPLK atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun adalah menyediakan kebutuhan DPLK untuk menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Pendiri dan Mitra Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pendiri dan Mitra Pendiri wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pendiri Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah wajib menunjuk Dewan Pengawas Syariah atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pendiri dapat memberhentikan dan mengubah susunan Dewan Pengawas Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Organ Dana Pensiun |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 1 |  |  |  |
| Pengurus |  |  |  |
| Pasal 42 | Cukup jelas. |  |  |
| Orang yang ditunjuk sebagai Pengurus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. warga negara Republik Indonesia; |  |  |  |
| 1. memiliki akhlak dan moral yang baik; |  |  |  |
| 1. tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; |  |  |  |
| 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tindak pidana di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; dan |  |  |  |
| 1. memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun yang dibuktikan dengan sertifikasi pengetahuan di bidang Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 43 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), orang yang ditunjuk sebagai Pengurus wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. |  |  |  |
| 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 44 |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pengurus yang salah satunya ditunjuk sebagai ketua. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana Pensiun dapat memiliki lebih dari 2 (dua) orang anggota Pengurus disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Seluruh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko. | Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen). Contoh, apabila jumlah Pengurus Dana Pensiun adalah 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang Pengurus Dana Pensiun wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi dan manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikasi di bidang investasi dan manajemen risiko. |  |  |
| 1. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan. | Yang dimaksud dengan “fungsi keuangan” adalah fungsi pengadministrasian keuangan, tidak termasuk fungsi yang melakukan kegiatan investasi. |  |  |
| 1. Pengurus yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan serta memadai terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. | Yang dimaksud dengan “pengetahuan yang relevan” adalah pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugas Pengurus Dana Pensiun. Contohnya bagi Pengurus Dana Pensiun yang membidangi investasi harus memiliki pengetahuan di bidang investasi atau bagi Pengurus Dana Pensiun yang membidangi kepatuhan harus mengetahui aspek legal setiap tindakan yang dilakukan oleh Dana Pensiun dan menguasai peraturan, paling sedikit bagi Dana Pensiun.  Kompetensi dan pengalaman yang memadai dibuktikan di antaranya mencakup latar belakang pendidikan, lamanya bekerja, dan/atau sertifikasi. |  |  |
| 1. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Dana Pensiun untuk menyesuaikan jumlah Pengurus. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 45 |  |  |  |
| Pengurus wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; dan | Yang dimaksud dengan “independen” mengacu kepada prinsip terkait independensi, sedangkan “objektif” mengacu kepada prinsip terkait kewajaran. |  |  |
| 1. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 46 |  |  |  |
| Mayoritas Pengurus dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama. | Yang dimaksud dengan “mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah Pengurus DPPK. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga meliputi:   1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri; 7. suami atau istri; 8. mertua; 9. besan; 10. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; 11. kakek atau nenek dari suami atau istri; 12. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 47 |  |  |  |
| Pengurus wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun; | Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab penuh” adalah sesuai dengan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun |  |  |
| 1. menyusun dan mereviu pedoman Tata Kelola Dana Pensiun; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 48 |  |  |  |
| Pengurus dilarang: |  |  |  |
| 1. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Pengurus dimaksud menjabat; | Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota Pengurus dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau karyawan Dana Pensiun. |  |  |
| 1. memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pendiri. | Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal Pengurus sebagai Peserta menerima Manfaat Pensiun secara wajar. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 49 |  |  |  |
| Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pengurus DPLK juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. memastikan Peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai; | Salah satu cara untuk memastikan Peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai adalah melakukan valuasi atas toleransi risiko Peserta agar dapat disesuaikan dengan paket atau jenis investasi pilihan Peserta. |  |  |
| 1. memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan paket atau jenis investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui Dana Pensiun; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan kinerja dari paket atau jenis investasi termonitor dengan baik; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan biaya yang dibebankan kepada Peserta diungkapkan secara rinci; dan | Yang dimaksud dengan “diungkapkan secara rinci” adalah pengungkapan biaya berdasarkan jenis biaya yang dibebankan kepada Peserta menurut PDP dan bukan total biaya yang dibebankan kepada Peserta. |  |  |
| 1. memastikan Peserta ditawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi. | Dalam menawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi, Dana Pensiun dapat memberikan simulasi atau proyeksi atas manfaat yang diharapkan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 50 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengurus dilarang merangkat jabatan sebagai: |  |  |  |
| * + - * 1. Pengurus, Dewan Pengawas, atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun lain; |  |  |  |
| * + - * 1. Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama; atau |  |  |  |
| * + - * 1. direksi atau dewan komisaris atau yang setara, atau pejabat lain, pada perusahaan dan/atau lembaga lain. |  |  |  |
| 1. Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk: |  |  |  |
| * + - * 1. Pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Dana Pensiun pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus; dan |  |  |  |
| * + - * 1. Pengurus DPPK yang menduduki jabatan selain direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada Pemberi Kerja. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51 | Cukup jelas. |  |  |
| Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 52 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. |  |  |  |
| 1. Hasil rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Pengurus dan didokumentasikan dengan baik. |  |  |  |
| 1. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. |  |  |  |
| 1. Pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Pengurus berhak menerima salinan risalah rapat Pengurus. |  |  |  |
| 1. Jumlah rapat Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 53 | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengurus pada DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) Program Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2 |  |  |  |
| Dewan Pengawas DPPK |  |  |  |
| Pasal 54 |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang yang salah satunya ditunjuk sebagai ketua, terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPPK ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Dewan Pengawas dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari Peserta aktif di DPPK. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Dalam hal Dewan Pengawas DPPK yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang dan jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang maka paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas DPPK yang mewakili Peserta adalah pensiunan yang masih menerima manfaat pensiun secara berkala. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). | Cukup jelas |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat bertindak mewakili kepentingan Peserta. | Cukup jelas |  |  |
| 1. DPPK wajib mengkomunikasikan pengangkatan Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Peserta. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Paling sedikit separuh dari jumlah Dewan Pengawas DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. | Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen). Contoh, apabila jumlah Dewan Pengawas DPPK adalah 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang Dewan Pengawas DPPK wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPPK yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan serta memadai terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. | Pengetahuan yang relevan dengan jabatan Dewan Pengawas DPPK antara lain pengetahuan mengenai mekanisme dan teknik pengawasan DPPK.  Kompetensi dan pengalaman yang memadai dibuktikan di antaranya mencakup latar belakang pendidikan, lamanya bekerja, dan/atau sertifikasi. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 55 | Cukup jelas. |  |  |
| Orang yang dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas DPPK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. warga negara Republik Indonesia; |  |  |  |
| 1. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan |  |  |  |
| 1. tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 56 | Cukup jelas. |  |  |
| Dewan Pengawas DPPK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; |  |  |  |
| 1. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional; |  |  |  |
| 1. mampu bertindak untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; |  |  |  |
| 1. mendahulukan kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi; |  |  |  |
| 1. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; dan |  |  |  |
| 1. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPPK. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 57 |  |  |  |
| Mayoritas Dewan Pengawas DPPK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Pengurus pada DPPK yang sama. | Yang dimaksud dengan “mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah Dewan Pengawas DPPK. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 58 |  |  |  |
| Mantan Pengurus DPPK harus menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Dewan Pengawas wakil Peserta pada DPPK yang sama. | Yang dimaksud dengan “masa tunggu” adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai Pengurus DPPK, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Dewan Pengawas wakil Peserta. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 59 |  |  |  |
| Dewan Pengawas DPPK wajib: |  |  |  |
| 1. bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPPK; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; | Yang dimaksud dengan “memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun” antara lain melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun. |  |  |
| 1. memastikan pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan bahwa Pengurus DPPK telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mengawasi Pengurus DPPK dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan bahwa DPPK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengurus, dan seluruh karyawan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DPLK; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; dan | Yang dimaksud dengan “laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun” adalah laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. menyusun laporan kinerja investasi DPPK. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 60 | Cukup jelas. |  |  |
| Dewan Pengawas DPPK berhak memperoleh informasi dari Pengurus DPPK mengenai DPPK secara lengkap dan tepat waktu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 61 |  |  |  |
| Dewan Pengawas DPPK dilarang: |  |  |  |
| 1. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas DPPK dimaksud menjabat; | Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota Dewan Pengawas dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus DPPK, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau karyawan Dana Pensiun. |  |  |
| 1. memanfaatkan DPPK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPPK; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPPK tempat Dewan Pengawas DPPK dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan; dan | Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal Dewan Pengawas sebagai Peserta menerima Manfaat Pensiun secara wajar. |  |  |
| 1. mencampuri kegiatan operasional DPPK yang menjadi tanggung jawab Pengurus DPPK. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 62 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPPK dilarang merangkap jabatan sebagai: |  |  |  |
| * + - * 1. Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada DPPK yang sama; atau |  |  |  |
| * + - * 1. Dewan Pengawas, Pengurus, atau Dewan Pengawas Syariah pada DPPK yang lain. |  |  |  |
| 1. Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk dalam hal Pendiri DPPK tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 63 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPPK wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPPK wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus DPPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPPK wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun. |  |  |  |
| 1. Hasil rapat Dewan Pengawas DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik. |  |  |  |
| 1. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPPK yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas. |  |  |  |
| 1. Jumlah rapat Dewan Pengawas DPPK yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 64 | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Dewan Pengawas pada DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) Program Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 3 |  |  |  |
| Dewan Pengawas DPLK |  |  |  |
| Pasal 65 |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPLK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang yang salah satunya ditunjuk sebagai ketua. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPLK ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPLK yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan serta memadai terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. | Pengetahuan yang relevan dengan jabatan Dewan Pengawas DPLK antara lain pengetahuan mengenai mekanisme dan teknik pengawasan DPLK.  Kompetensi dan pengalaman yang memadai dibuktikan di antaranya mencakup latar belakang pendidikan, lamanya bekerja, dan/atau sertifikasi. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 66 | Cukup jelas. |  |  |
| Orang yang dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas DPLK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. warga negara Republik Indonesia; |  |  |  |
| 1. memiliki akhlak dan moral yang baik; |  |  |  |
| 1. tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 67 | Cukup jelas. |  |  |
| Dewan Pengawas DPLK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; |  |  |  |
| 1. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional; |  |  |  |
| 1. mampu bertindak untuk kepentingan DPLK, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; |  |  |  |
| 1. mendahulukan kepentingan DPLK, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi; |  |  |  |
| 1. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPLK, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; dan |  |  |  |
| 1. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPLK. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 68 |  |  |  |
| Mayoritas Dewan Pengawas DPLK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Pengurus pada DPLK yang sama. | Yang dimaksud dengan “mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah Dewan Pengawas DPLK. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 69 |  |  |  |
| Dewan Pengawas DPLK wajib: |  |  |  |
| 1. bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPLK; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; | Yang dimaksud dengan “memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun” antara lain melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun. |  |  |
| 1. memastikan pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan bahwa Pengurus DPLK telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPLK, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mengawasi Pengurus DPLK dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memastikan bahwa DPLK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengurus DPLK, dan seluruh karyawan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DPLK; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; dan | Yang dimaksud dengan “laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun” adalah laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. menyusun laporan kinerja investasi DPLK. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 70 |  |  |  |
| Dewan Pengawas DPLK berhak memperoleh informasi dari Pengurus DPLK mengenai DPLK secara lengkap dan tepat waktu. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 71 |  |  |  |
| Dewan Pengawas DPLK dilarang: |  |  |  |
| 1. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas DPLK dimaksud menjabat; | Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota Dewan Pengawas dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus DPPK, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau karyawan Dana Pensiun. |  |  |
| 1. memanfaatkan DPLK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPLK; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPLK tempat Dewan Pengawas DPLK dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan; dan | Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal Dewan Pengawas sebagai Peserta menerima Manfaat Pensiun secara wajar. |  |  |
| 1. mencampuri kegiatan operasional DPLK yang menjadi tanggung jawab Pengurus DPLK. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 72 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPLK dilarang merangkap jabatan sebagai: |  |  |  |
| * + - * 1. Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada DPPK yang sama; atau |  |  |  |
| * + - * 1. Dewan Pengawas, Pengurus, atau Dewan Pengawas Syariah pada DPPK yang lain. |  |  |  |
| 1. Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk dalam hal Pendiri DPLK tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 73 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPLK wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPLK wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus DPLK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPLK wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun. |  |  |  |
| 1. Hasil rapat Dewan Pengawas DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik. |  |  |  |
| 1. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas DPLK yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas. |  |  |  |
| 1. Jumlah rapat Dewan Pengawas DPLK yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 4 |  |  |  |
| Dewan Pengawas Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 74 |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari organ Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ahli syariah yang ditunjuk oleh Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan secara jelas dalam surat keputusan Pendiri. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Isi surat keputusan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama Dewan Pengawas Syariah dan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal jumlah Dewan Pengawas Syariah lebih dari 1 (satu) orang, salah satu dari Dewan Pengawas Syariah ditunjuk sebagai ketua. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. | Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen). Contoh, apabila jumlah anggota DPS adalah 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang anggota DPS wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 75 | Cukup jelas. |  |  |
| Orang yang dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. warga negara Republik Indonesia; |  |  |  |
| 1. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan |  |  |  |
| 1. tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 76 | Cukup jelas. |  |  |
| Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; |  |  |  |
| 1. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional; |  |  |  |
| 1. mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; |  |  |  |
| 1. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi; |  |  |  |
| 1. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat; dan |  |  |  |
| 1. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 77 |  |  |  |
| Dalam hal jumlah Dewan Pengawas Syariah lebih dari 1 (satu) orang, mayoritas Dewan Pengawas Syariah dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas, Pengurus pada Dana Pensiun yang sama. | Yang dimaksud dengan “mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah DPS. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 78 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah wajib: |  |  |  |
| * + - * 1. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Pengurus agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan |  |  |  |
| * + - * 1. menyampaikan temuan pelanggaran yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada Dana Pensiun yang diawasi kepada Pengurus. |  |  |  |
| * + - * 1. mengawasi penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| * + - * 1. memberikan nasihat terkait aspek syariah dari penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; dan |  |  |  |
| * + - * 1. membuat laporan yang paling sedikit memuat kepatuhan penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan paling sedikit terhadap: |  |  |  |
| * + - * 1. akad yang digunakan; |  |  |  |
| * + - * 1. pengelolaan iuran; |  |  |  |
| * + - * 1. penempatan investasi; |  |  |  |
| * + - * 1. manfaat pensiun; dan |  |  |  |
| * + - * 1. manfaat lain. |  |  |  |
| 1. Laporan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memuat paling sedikit hasil pengawasan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 79 | Cukup jelas. |  |  |
| Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh: |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Pengurus mengenai Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah secara lengkap dan tepat waktu; dan |  |  |  |
| 1. gaji/honorarium dan tunjangan lainnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 80 |  |  |  |
| Dewan Pengawas Syariah dilarang: |  |  |  |
| 1. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat; | Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota DPS dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, anggota Pengurus, anggota Dewan Pengawas, dan/atau karyawan Dana Pensiun. |  |  |
| 1. memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan. | Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal DPS sebagai Peserta menerima manfaat pensiun secara wajar. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 81 |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan syariah lainnya. | Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan syariah” adalah lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 82 |  |  |  |
| Jabatan Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila: |  |  |  |
| 1. masa jabatan berakhir; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. meninggal dunia; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mengundurkan diri; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. diberhentikan oleh Pendiri; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah yang diselenggarakan Dana Pensiun berakhir. | Untuk Dana Pensiun Syariah, Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah berakhir pada saat Dana Pensiun dinyatakan bubar.  Untuk Unit Syariah dan paket investasi syariah, Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah berakhir pada saat perubahan PDP dalam rangka pengakhiran Unit Syariah atau paket investasi syariah disahkan oleh OJK. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 83 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. |  |  |  |
| 1. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik. |  |  |  |
| 1. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas Syariah berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah. |  |  |  |
| 1. Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Dalam hal jumlah Dewan Pengawas Syariah adalah 1 (satu) orang maka rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan rapat Dewan Pengawas DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau rapat Dewan Pengawas DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Fungsi dan Komite |  |  |  |
| Pasal 84 |  |  |  |
| 1. Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Dana Pensiun yang memiliki aset tersedia lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib membentuk fungsi: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. audit internal; dan |  |  |  |
| * + - * 1. kepatuhan. |  |  |  |
| 1. Pembentukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 (satu) atau lebih satuan kerja. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun menggunakan jasa pihak ketiga dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib memastikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dana Pensiun. | Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah administrator. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 85 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Fungsi audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a bertugas menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. |  |  |  |
| 1. Fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b bertugas memastikan agar seluruh kegiatan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun dengan prinsip syariah dan mengelola risiko kepatuhan. |  |  |  |
| 1. Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 bertanggung jawab kepada Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 86 |  |  |  |
| 1. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. komite audit; |  |  |  |
| * + - * 1. komite pemantau risiko; dan |  |  |  |
| * + - * 1. komite nominasi dan remunerasi. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang memiliki aset neto lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib memiliki komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. | Yang dimaksud dengan “aset neto” adalah aset neto yang didapat dari laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 87 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa: |  |  |  |
| * + - * 1. struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik; |  |  |  |
| * + - * 1. pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan |  |  |  |
| * + - * 1. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. |  |  |  |
| 1. Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan paling sedikit 1 (satu) orang pihak lain di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. |  |  |  |
| 1. Dalam hal komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a tidak dibentuk, Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 88 |  |  |  |
| 1. Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki pengalaman di bidang pemantauan risiko. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada DPPK paling sedikit terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan pihak lain. | Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Pengawas, Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. |  |  |
| 1. Dalam hal komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b tidak dibentuk, Dewan Pengawas melaksanakan tugas komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 89 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c bertugas sebagai: |  |  |  |
| * + - * 1. fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus; dan |  |  |  |
| * + - * 1. fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi. |  |  |  |
| 1. Komite nominasi dan remunerasi terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas dan pihak lain. |  |  |  |
| 1. Dalam hal komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c tidak dibentuk, Dewan Pengawas melaksanakan tugas komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Auditor Eksternal dan Aktuaris |  |  |  |
| Pasal 90 |  |  |  |
| 1. Auditor eksternal Dana Pensiun wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh komite audit atau Dewan Pengawas yang melaksanakan fungsi komite audit. | Auditor eksternal Dana Pensiun adalah akuntan publik yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. |  |  |
| 1. Pengusulan calon auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut; dan |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan pihak yang berkepentingan di Dana Pensiun dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal dalam melakukan audit laporan keuangan Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 91 |  |  |  |
| 1. Aktuaris yang akan digunakan jasanya dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon aktuaris yang diajukan oleh Pengurus. | Yang dimaksud dengan “Aktuaris” adalah konsultan aktuaria yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Pengusulan calon aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai: |  |  |  |
| * + - * 1. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk aktuaris tersebut; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh aktuaris, untuk menggunakan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil valuasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud dengan “standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia” adalah standar praktik aktuaria yang ditetapkan oleh asosiasi Aktuaris yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib menyediakan semua data penunjang yang diperlukan oleh aktuaris dalam melakukan valuasi aktuaria. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Praktik dan Kebijakan Remunerasi |  |  |  |
| Pasal 92 |  |  |  |
| 1. Pendiri wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Dana Pensiun dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi karyawan yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Dana Pensiun dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau pihak terkait yang berhak memperoleh manfaat. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib menerapkan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan paling sedikit: |  |  |  |
| * + - * 1. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. prestasi kerja individual; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. kewajaran dengan *peer group*; dan | Yang dimaksud dengan “*peer group*” adalah kelompok yang memiliki karakteristik bisnis, profil risiko, dan/atau kompleksitas yang relatif sama dengan Dana Pensiun yang bersangkutan. |  |  |
| * + - * 1. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh |  |  |  |
| Tata Kelola Investasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 1 |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
| Pasal 93 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam melakukan pengelolaan investasi, Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh manfaat. |  |  |  |
| 1. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus wajib menyusun dan menerapkan pedoman investasi Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Pedoman investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: |  |  |  |
| * + - * 1. kewenangan, otorisasi, dan tanggung jawab Pengurus dan karyawan Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. proses analisis dalam rangka penempatan dan pelepasan investasi; |  |  |  |
| * + - * 1. evaluasi yang memadai atas pengelolaan investasi; dan |  |  |  |
| * + - * 1. manajemen risiko investasi dengan memperhatikan liabilitas. |  |  |  |
| 1. Dalam melakukan penempatan investasi, Dana Pensiun wajib memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2 |  |  |  |
| Tata Kelola Teknologi Informasi |  |  |  |
| Pasal 94 |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib menerapkan tata sistem teknologi informasi yang efektif. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: |  |  |  |
| * + - * 1. struktur organisasi sistem informasi; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi; dan | Yang dimaksud dengan “instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi” adalah standar prosedur operasional*.* |  |  |
| * + - * 1. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 3 |  |  |  |
| Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal |  |  |  |
| Pasal 95 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif. |  |  |  |
| 1. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 96 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengurus wajib menerapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi serta peraturan internal lain Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedelapan |  |  |  |
| Keterbukaan Informasi |  |  |  |
| Pasal 97 | Cukup jelas. |  |  |
| Dana Pensiun wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan bagi calon Peserta dan/atau Peserta dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 98 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang handal dan terpercaya untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 99 |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi hal penting yang meliputi: |  |  |  |
| * + - * 1. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. transaksi material dengan pihak terkait; | Yang dimaksud dengan “transaksi material” adalah transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan penilaian Pengurus atau Dewan Pengawas dan/atau berdasarkan standar akuntasi keuangan. |  |  |
| * + - * 1. benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. informasi material lain mengenai Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesembilan |  |  |  |
| Hubungan Pemangku Kepentingan |  |  |  |
| Pasal 100 | Cukup jelas. |  |  |
| Dana Pensiun wajib: |  |  |  |
| 1. menghormati hak pemangku kepentingan; dan |  |  |  |
| 1. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan karyawan, Peserta, Pihak yang Berhak memperoleh manfaat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesepuluh |  |  |  |
| Etika Bisnis |  |  |  |
| Pasal 101 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan Dana Pensiun dilarang untuk memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan Dana Pensiun, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan Dana Pensiun dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 102 | Cukup jelas. |  |  |
| Dana Pensiun wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi komite dan seluruh karyawan Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesebelas |  |  |  |
| Penilaian Sendiri dan Laporan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun |  |  |  |
| Pasal 103 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. |  |  |  |
| 1. Penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 104 |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada setiap akhir tahun buku kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: |  |  |  |
| * + - * 1. transparansi penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun; | Aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun termasuk:   1. jumlah rapat Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; 2. jumlah kehadiran Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dalam rapat; 3. laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; dan 4. pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1). |  |  |
| * + - * 1. penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98; dan | Penilaian sendiri yang dilakukan oleh Dana Pensiun dalam bentuk kuesioner yang bentuk dan susunannya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala Dana Pensiun. |  |  |
| * + - * 1. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala Dana Pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keduabelas |  |  |  |
| Sanksi Administratif | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 105 |  |  |  |
| 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 41 ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 54 ayat (1), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 80, Pasal 81, Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (3), Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 ayat (1), dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * + - * 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| * + - * 1. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau |  |  |  |
| * + - * 1. penurunan tingkat kesehatan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya |  |  |  |
| 1. Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketigabelas |  |  |  |
| Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama |  |  |  |
| Pasal 106 | Cukup jelas. |  |  |
| Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB V |  |  |  |
| PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Pembubaran Dana Pensiun |  |  |  |
| Pasal 107 |  |  |  |
| 1. Pembubaran Dana Pensiun dapat terjadi dalam hal: |  |  |  |
| * + - * 1. terdapat permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. Pendiri bubar; atau | Yang dimaksud dengan "Pendiri bubar” termasuk apabila Pendiri dalam proses likuidasi antara lain pembubaran Pendiri yang tidak mengakibatkan adanya pergantian Pendiri. |  |  |
| * + - * 1. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |  |
| * + - * 1. Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak yang Berhak; | Yang dimaksud dengan "tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak yang Berhak" di antaranya tidak dapat membayar Manfaat Pensiun yang telah jatuh tempo. |  |  |
| * + - * 1. Terhentinya iuran pada Dana Pensiun yang dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun dimaksud; atau | Pemberi Kerja tidak membayar iuran kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja dalam jangka waktu tertentu sehingga mengakibatkan kondisi keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja memburuk. Memburuknya kondisi keuangan ditunjukkan dengan menurunnya rasio pendanaan sehingga Dana Pensiun Pemberi Kerja memiliki potensi tidak mampu membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak yang Berhak pada masa yang akan datang atau bertambahnya umur piutang iuran yang memiliki potensi tidak optimalnya akumulasi dana Peserta. |  |  |
| * + - * 1. Dana Pensiun tidak beroperasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak didirikan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan: |  |  |  |
| * + - * 1. pembubaran Dana Pensiun; dan | Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan persetujuan secara administratif tentang pembubaran Dana Pensiun. Pembubaran tersebut memerlukan tindak lanjut agar hal yang berhubungan dengan masalah penyelesaian dapat dilaksanakan melalui proses likuidasi.  Dalam hal Pendiri bubar, likuidator Pendiri dapat mewakili Pendiri untuk menunjuk likuidator Dana Pensiun. |  |  |
| * + - * 1. likuidator yang diajukan oleh Pendiri atau yang diajukan oleh likuidator Pendiri. | Yang dimaksud dengan "likuidator Pendiri" adalah pihak-pihak yang memiliki tugas melakukan likuidasi Pendiri. |  |  |
| 1. Dalam hal pembubaran Dana Pensiun terjadi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan likuidator. | Penunjukan likuidator termasuk perubahannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat berasal dari usulan Pendiri Dana Pensiun. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran |  |  |  |
| Pasal 108 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena terdapat permintaan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a, Pendiri wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: |  |  |  |
| * + - * 1. alasan atau latar belakang pembubaran Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. bukti sosialisasi kepada Peserta mengenai rencana pembubaran; dan |  |  |  |
| * + - * 1. usulan nama calon Tim Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersama dengan: |  |  |  |
| * + - * 1. fotokopi bukti identitas calon Tim Likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; dan |  |  |  |
| * + - * 1. bukti penyelesaian pungutan OJK dan denda administratif terutang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 109 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Persetujuan atas permohonan pembubaran disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis paling sedikit memuat: |  |  |  |
| * + - * 1. tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. penunjukan Tim Likuidasi; dan |  |  |  |
| * + - * 1. hak dan kewajiban Tim Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pembubaran, Dana Pensiun wajib: |  |  |  |
| * + - * 1. menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan usaha Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. mencantumkan frasa ”dalam likuidasi” di belakang nama Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. seluruh tindakan kepengurusan Dana Pensiun dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. mengumumkan rencana pembubaran dan rencana penyelesaian kewajiban Dana Pensiun kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari; |  |  |  |
| * + - * 1. menyelesaikan seluruh kewajiban Dana Pensiun kepada Peserta sesuai dengan rencana pembubaran, |  |  |  |
| sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 110 |  |  |  |
| 1. Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena Pendiri bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b, likuidator Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak likuidator Pendiri terbentuk. | Lihat penjelasan Pasal 107 ayat (2) huruf b. |  |  |
| 1. Dalam hal tidak terdapat likuidator Pendiri, pengajuan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendiri. | Pendiri yang memenuhi kriteria bubar berdasarkan Peraturan OJK ini bisa saja tidak atau belum melalui proses likuidasi. Dalam kasus tersebut, permohonan pembubaran Dana Pensiun diajukan oleh Pendiri. |  |  |
| 1. Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b apabila: |  |  |  |
| * + - * 1. Pendiri dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri atau peraturan perundang-undangan; | Yang dimaksud dengan “dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri” dalam ayat ini antara lain:   1. dalam hal Pendiri berbentuk perseroan terbatas, anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham; 2. dalam hal Pendiri berbentuk koperasi anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota. |  |  |
| * + - * 1. Pendiri dinyatakan bubar oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau | Contoh pembubaran Pendiri oleh pihak yang berwenang adalah pembubaran Pendiri yang berbentuk perseroan terbatas oleh pengadilan atau pembubaran Pendiri yang berbentuk koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. |  |  |
| * + - * 1. izin usaha Pendiri dicabut, dalam hal Dana Pensiun berbentuk DPLK. | Berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Oleh sebab itu, dalam hal Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan dicabut izin usahanya sebagai bank atau perusahaan asuransi jiwa, Pendiri tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pendiri. |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib melaporkan kepada OJK apabila Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau ayat (3) huruf b. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. uraian mengenai kondisi Dana Pensiun, antara lain kondisi pendanaan bagi DPPK, jumlah Peserta, dan iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja; |  |  |  |
| * + - * 1. rencana penyelesaian kewajiban Dana Pensiun kepada Peserta; |  |  |  |
| * + - * 1. rencana pembubaran; dan |  |  |  |
| * + - * 1. usulan nama calon Tim Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersama dengan: |  |  |  |
| * + - * 1. dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau ayat (3) huruf b; | Contoh dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain: dalam hal Pendiri berbentuk perseroan terbatas, yaitu salinan akta keputusan rapat umum pemegang saham Pendiri yang memutuskan bahwa Pendiri bubar. |  |  |
| * + - * 1. fotokopi bukti identitas calon Tim Likuidasi; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. bukti penyelesaian pungutan OJK dan denda administratif terutang. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Persetujuan atas permohonan pembubaran disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. penunjukan Tim Likuidasi; dan |  |  |  |
| * + - * 1. hak dan kewajiban Tim Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pembubaran, Dana Pensiun wajib: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan usaha Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. mencantumkan frasa ”dalam likuidasi” di belakang nama Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. seluruh tindakan kepengurusan Dana Pensiun dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. mengumumkan rencana pembubaran dan rencana penyelesaian kewajiban Dana Pensiun kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari; |  |  |  |
| * + - * 1. menyelesaikan seluruh kewajiban Dana Pensiun kepada Peserta sesuai dengan rencana pembubaran,   sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (8). |  |  |  |
| 1. Dalam hal likuidator Pendiri atau Pendiri tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembubaran Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan penunjukan likuidator Pendiri, Pengurus, atau pihak lain sebagai Tim Likuidasi. | Yang dimaksud dengan “pihak lain” pada ayat ini antara lain akuntan publik dan aktuaris. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 111 |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c angka 1 apabila: |  |  |  |
| * + - * 1. Dana Pensiun mengalami masalah likuiditas sehingga diperkirakan tidak dapat membayar manfaat pensiun sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya; dan/atau | Salah satu contoh indikasi Dana Pensiun mengalami masalah likuiditas sehingga diperkirakan tidak dapat membayar manfaat pensiun sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya adalah apabila jumlah kekayaan likuid Dana Pensiun lebih kecil dari estimasi kebutuhan dana untuk membayar manfaat pensiun setahun ke depan. |  |  |
| * + - * 1. Dana Pensiun berada dalam status pengawasan khusus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan status oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c angka 2 apabila: |  |  |  |
| * + - * 1. Pendiri tidak membayar iuran jatuh tempo selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. Pendiri memiliki akumulasi tunggakan iuran jatuh tempo yang besarnya setara dengan iuran 2 (dua) tahun atau lebih. | Pemenuhan kriteria pada huruf ini dihitung berdasarkan jumlah tunggakan iuran Pendiri dibandingkan dengan iuran jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun terakhir.  Contoh: Iuran jatuh tempo tahun 2012 2022= Rp 1,2 miliar.  Iuran jatuh tempo tahun 2013 2023= Rp 1,4 miliar.  Total iuran jatuh tempo 2 (dua) tahun terakhir = Rp 2,6 miliar.  Apabila per 31 Desember 2013 2023 besar tunggakan iuran Pendiri adalah sama dengan atau lebih dari Rp 2,6 miliar, Dana Pensiun dinilai memenuhi kriteria pada huruf b. |  |  |
| 1. Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c angka 3 apabila: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. sejak didirikan Dana Pensiun tidak memiliki Peserta; dan/atau |  |  |  |
| * + - * 1. sudah tidak memiliki peserta aktif dan peserta pasif. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Dana Pensiun telah memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembubaran Dana Pensiun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penunjukan Pengurus atau pihak lain sebagai Tim Likuidasi. | Lihat penjelasan Pasal 110 ayat (11). |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Penutupan Unit Syariah DPPK yang Menyelenggarakan PPIP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 112 |  |  |  |
| 1. Penutupan Unit Syariah dilakukan dalam hal: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. DPPK yang membentuk Unit Syariah bubar; atau |  |  |  |
| * + - * 1. Unit Syariah tidak memiliki peserta selama 1 (satu) tahun berturut-turut. |  |  |  |
| 1. Penutupan Unit Syariah dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perubahan PDP. | Perubahan PDP dimaksudkan untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang ditujukan khusus untuk penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (misalnya akad). |  |  |
| 1. Dalam hal penutupan Unit Syariah telah ditetapkan oleh OJK karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tim likuidasi melakukan penyelesaian proses likuidasi sesuai dengan Prinsip Syariah. | Penyelesaian proses likuidasi dari Unit Syariah antara lain penyelesaian hak peserta sesuai dengan Prinsip Syariah. Penyelesaian hak peserta sesuai dengan Prinsip Syariah antara lain pengalihan hak pensiun ditunda kepada Dana Pensiun lain yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Penutupan Penjualan Paket Investasi Syariah DPLK |  |  |  |
| Pasal 113 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penutupan penjualan Paket Investasi Syariah DPLK dilakukan Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP yang memuat latar belakang penutupan Paket Investasi Syariah kepada OJK. |  |  |  |
| 1. Penutupan penjualan Paket Investasi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penutupan secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Dalam hal penutupan penjualan Paket Investasi Syariah telah ditetapkan oleh OJK, DPLK wajib melakukan pengalihan aset peserta dari Paket Investasi Syariah ke DPLK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| 1. Pemilihan DPLK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan atas persetujuan peserta. |  |  |  |
| 1. Pengalihan aset peserta Paket Investasi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan penutupan penjualan Paket Investasi Syariah oleh OJK. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Tim Likuidasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 1  Umum |  |  |  |
| Pasal 114 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sejak persetujuan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (8) atau penetapan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (5): |  |  |  |
| * + - * 1. tanggung jawab dan kepengurusan Dana Pensiun dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah: |  |  |  |
| * + - * 1. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah serta menjadi non aktif; |  |  |  |
| * + - * 1. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan OJK; dan |  |  |  |
| * + - * 1. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun dalam Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah dan pegawai Dana Pensiun dalam Likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai Dana Pensiun dalam Likuidasi dilarang menghambat proses Likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2 |  |  |  |
| Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi |  |  |  |
| Pasal 115 | Cukup jelas. |  |  |
| Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pembubaran; |  |  |  |
| 1. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai Dana Pensiun; |  |  |  |
| 1. menyampaikan informasi kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak; |  |  |  |
| 1. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Dana Pensiun; |  |  |  |
| 1. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |  |
| 1. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada Pendiri dan Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |  |
| 1. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi; dan |  |  |  |
| 1. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 116 | Cukup jelas. |  |  |
| Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Tim Likuidasi berwenang: |  |  |  |
| 1. mewakili Dana Pensiun dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Dana Pensiun tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan; |  |  |  |
| 1. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur; |  |  |  |
| 1. melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para kreditur; |  |  |  |
| 1. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Dana Pensiun dalam Likuidasi; |  |  |  |
| 1. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi, antara lain konsultan aktuaria, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum; |  |  |  |
| 1. melakukan pemanggilan kepada para kreditur; |  |  |  |
| 1. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Dana Pensiun yang diduga merugikan Dana Pensiun dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan |  |  |  |
| 1. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 117 | Cukup jelas. |  |  |
| Dalam rangka mewakili Dana Pensiun dalam Likuidasi di luar dan di dalam Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, Tim Likuidasi dapat menggunakan jasa advokat/pengacara/konsultan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 118 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam rangka mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi dan penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d dan huruf e, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan: |  |  |  |
| * + - * 1. efisiensi dalam pelaksanaan Likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. keahlian tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain dimaksud; dan |  |  |  |
| * + - * 1. kemampuan keuangan Dana Pensiun dalam Likuidasi untuk membayar remunerasi tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain dimaksud. |  |  |  |
| 1. Remunerasi tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi honorarium, tunjangan hari raya, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 119 | Cukup jelas. |  |  |
| Dalam rangka meminta pembatalan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf g, Tim Likuidasi terlebih dahulu melakukan tindakan antara lain mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun yang diduga merugikan Dana Pensiun, dengan cara: |  |  |  |
| 1. melihat keabsahan perikatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |  |
| 1. menilai kewajaran harga transaksi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 120 | Cukup jelas. |  |  |
| Tim Likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 3  Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi |  |  |  |
| Pasal 121 |  |  |  |
| 1. Pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pendiri, paling sedikit harus dilengkapi dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. laporan perkembangan proses likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan |  |  |  |
| * + - * 1. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi. |  |  |  |
| 1. Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| * + - * 1. menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan Likuidasi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Dana Pensiun dalam likuidasi; atau | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Yang dimaksud dengan “langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain penyelesaian melalui pengadilan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 4  Anggota Tim Likuidasi |  |  |  |
| Pasal 122 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Dana Pensiun dalam likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. |  |  |  |
| 1. Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan likuidasi. |  |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan, Pendiri, Pengurus, atau Dewan Pengawas dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Dana Pensiun, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat merugikan Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 123 |  |  |  |
| 1. Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Tim Likuidasi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Keanggotan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas: |  |  |  |
| * + - * 1. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang dana pensiun; dan | Pengetahuan dan pengalaman di bidang dana pensiun meliputi pengalaman sebagai Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Dana Pensiun. |  |  |
| * + - * 1. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sesama anggota Tim Likuidasi dan antara anggota Tim Likuidasi dengan tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga semenda, atau hubungan keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai dengan derajat pertama. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 124 | Cukup jelas. |  |  |
| Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan Pendiri dan Peserta, Tim Likuidasi harus bertindak secara independen. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 5  Perubahan Tim Likuidasi |  |  |  |
| Pasal 125 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota Tim Likuidasi dapat diubah berdasarkan usulan Pendiri maupun pihak lain yang mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110. |  |  |  |
| 1. Usulan Pendiri maupun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan perubahan anggota Tim Likuidasi dan dilengkapi dengan persyaratan: |  |  |  |
| * + - * 1. fotokopi bukti identitas calon Tim Likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan |  |  |  |
| * + - * 1. pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 6  Remunerasi Tim Likuidasi |  |  |  |
| Pasal 126 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh Pendiri. |  |  |  |
| 1. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: |  |  |  |
| * + - * 1. honorarium; dan |  |  |  |
| * + - * 1. penghasilan/fasilitas lain. |  |  |  |
| 1. Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: |  |  |  |
| * + - * 1. jumlah aset dan kewajiban; |  |  |  |
| * + - * 1. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Dana Pensiun; dan |  |  |  |
| * + - * 1. kualifikasi anggota Tim Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Dana Pensiun dalam likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 7  Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi |  |  |  |
| Pasal 127 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan likuidasi mengacu pada pedoman rencana kerja dan anggaran biaya. |  |  |  |
| 1. Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan likuidasi yang paling sedikit memuat: |  |  |  |
| * + - * 1. jenis kegiatan yang akan dilakukan; |  |  |  |
| * + - * 1. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan; |  |  |  |
| * + - * 1. jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan |  |  |  |
| * + - * 1. biaya likuidasi. |  |  |  |
| 1. Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, Tim Likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. |  |  |  |
| 1. Perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 128 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Permohonan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen: |  |  |  |
| * + - * 1. laporan keuangan per tanggal pembubaran yang telah diaudit; dan |  |  |  |
| * + - * 1. laporan aktuaris per tanggal pembubaran, bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima  Penyelesaian Likuidasi |  |  |  |
| Pasal 129 |  |  |  |
| 1. Dalam hal Tim Likuidasi telah menyelesaikan seluruh proses likuidasi, Tim Likuidasi mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya seluruh proses likuidasi. | Yang dimaksud dengan “selesainya seluruh proses likuidasi” pada ayat ini adalah pada saat kekayaan Dana Pensiun telah habis atau berjumlah 0 (nol) rupiah. |  |  |
| 1. Laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. gambaran umum Dana Pensiun sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam 109 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (8) atau penetapan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (5) sampai dengan selesainya seluruh proses likuidasi yang paling sedikit berisi: |  |  |  |
| * + - * 1. jumlah Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak; |  |  |  |
| * + - * 1. jumlah kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. pencairan kekayaan Dana Pensiun; dan |  |  |  |
| * + - * 1. pengalihan atau pembayaran hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak; |  |  |  |
| * + - * 1. realisasi atas pelaksanaan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. laporan keuangan per tanggal selesainya seluruh proses likuidasi, yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan |  |  |  |
| * + - * 1. bukti-bukti yang berkaitan dengan: |  |  |  |
| * + - * 1. pencairan kekayaan Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. penyelesaian kewajiban Dana Pensiun, termasuk penyelesaian hak kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak; dan |  |  |  |
| * + - * 1. pembayaran biaya likuidasi. |  |  |  |
| 1. Laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Likuidasi. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Pengawasan Proses Likuidasi Dana Pensiun oleh Dewan Pengawas |  |  |  |
| Pasal 130 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi Dana Pensiun kepada OJK paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1). |  |  |  |
| 1. Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai Tim Likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh  Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Likuidasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 131 |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengawasan pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal dipandang perlu, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung di Dana Pensiun dalam likuidasi. | Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain aktuaris independen dan penilai. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengganti anggota Tim Likuidasi apabila berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |  |
| * + - * 1. anggota Tim Likuidasi tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya; | Yang dimaksud dengan “tidak cakap” pada ayat ini antara lain apabila Tim Likuidasi tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai likuidator. |  |  |
| * + - * 1. anggota Tim Likuidasi terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. anggota Tim Likuidasi diketahui tidak memenuhi kriteria Tim Likuidasi; dan/atau | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. terdapat kondisi-kondisi tertentu pada anggota Tim Likuidasi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Tim Likuidasi. | Contoh kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Tim Likuidasi antara lain: anggota Tim Likuidasi mengundurkan diri, sakit, atau meninggal dunia. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 132 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa: |  |  |  |
| * + - * 1. laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan |  |  |  |
| * + - * 1. laporan aktuaris yang disusun oleh aktuaris dalam rangka pembubaran Dana Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti; |  |  |  |
| dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (8) atau penetapan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (5). |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan dan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk posisi per tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a. |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti harus memuat daftar saldo akumulasi dana Peserta |  |  |  |
| 1. Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun sesuai ketentuan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan memuat besarnya hak masing-masing Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 133 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Tim Likuidasi menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. |  |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: |  |  |  |
| * + - * 1. laporan keuangan Dana Pensiun; |  |  |  |
| * + - * 1. laporan pelaksanaan rencana kerja likuidasi; |  |  |  |
| * + - * 1. laporan realisasi biaya likuidasi; dan |  |  |  |
| * + - * 1. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedelapan |  |  |  |
| Penyelesaian Kewajiban Dana Pensiun |  |  |  |
| Pasal 134 |  |  |  |
| 1. Penyelesaian kewajiban Dana Pensiun dalam likuidasi kepada Peserta sebesar kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta. | Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c. |  |  |
| 1. Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen tertulis paling sedikit memuat: |  |  |  |
| * + - * 1. hak Peserta; dan | Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (4) huruf b. |  |  |
| * + - * 1. pengunaan Surplus, jika ada. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesembilan |  |  |  |
| Pengakhiran Badan Hukum Dana Pensiun |  |  |  |
| Pasal 135 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penyelesaian likudasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1). |  |  |  |
| 1. Penetapan persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penyelesaian likudasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), penetapan penolakan dimaksud menyebutkan alasan penolakannya. |  |  |  |
| 1. Tim Likuidasi bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala akibat yang timbul dari ditetapkannya penolakan atas permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 136 |  |  |  |
| 1. Tim Likuidasi wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya penetapan persetujuan atas laporan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun oleh Tim Likuidasi. | 15 (lima belas) hari adalah batas waktu penyampaian permohonan pengumuman kepada pihak yang berwenang melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. |  |  |
| 1. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Tim Likuidasi wajib menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Tim Likuidasi berakhir sejak status badan hukum Dana Pensiun berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesepuluh |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
| Pasal 137 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), Pasal 109 ayat (3), Pasal 110 ayat (4) dan ayat (9), Pasal 113 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 118 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 128 ayat (4), Pasal 129 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 132 ayat (1), Pasal 136 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * + - * 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| * + - * 1. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau |  |  |  |
| * + - * 1. penurunan tingkat kesehatan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya |  |  |  |
| 1. Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesebelas |  |  |  |
| Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama |  |  |  |
| Pasal 138 | Cukup jelas. |  |  |
| Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VI  KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
| Pasal 139 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan pengesahan dan perubahan PDP yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diproses mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Bagi Dana Pensiun yang sedang dalam proses likuidasi, berdasarkan ketetapan Tim Likuidasi, penyelesaian aset dan liabilitas Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan: |  |  |  |
| * + - * 1. rencana kerja likuidasi yang telah disetujui OJK sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku; atau |  |  |  |
| * + - * 1. penyesuaian rencana kerja likuidasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku wajib melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan |  |  |  |
| 1. Pendiri DPLK wajib menunjuk Pengurus dan Dewan Pengawas paling lambat 12 Januari 2025. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VII  KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
| Pasal 140 | Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan: |  |  |  |
| 1. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5852); |  |  |  |
| 1. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5853); |  |  |  |
| 1. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5854); |  |  |  |
| 1. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5928); |  |  |  |
| 1. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6356); dan |  |  |  |
| 1. Peraturan OJK Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5555),   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 141 | Cukup jelas. |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2024 |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal |  |  |  |
| MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR |  |  |  |